

DARI LITERAL KE INTERPRETATIF: PEMBACAAN “TEKS TAK TERTULIS” DALAM KARYA SASTRA

Asep Yusup Hidayat

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Indonesia

E-mail: a.y.hidayat@unpad.ac.id

ABSTRAK. Kekuatan sastra naratif sering didiskusikan dalam kaitannya dengan kemampuan narasi membuka celah dan ruang kosong yang harus diatasi secara estetis oleh pembacanya. Namun demikian, cara pembacaan yang semata bersifat estetis belum memberi ruang optimalnya bagi kekuatan sastra naratif sesungguhnya. Kekuatan tersebut terkait erat dengan realitas yang ditunjukkannya dengan berbagai cara dan tidak cukup direspons hanya sebatas estetis. Artikel ini bertujuan memetakan proses pembacaan interpretatif atas karya sastra naratif untuk pengembangan literasi berbasis *critical thinking* melalui penerapan konsep *gap-blank* dan *haunting-haunted*. Konsep-konsep tersebut digunakan untuk menunjukkan fenomena penyembunyian, ketakhadiran, atau bahkan penghilangan narasi yang berdampak kepada pergeseran cara membaca literal ke pembacaan interpretatif terhadap *Ditoeng Memeh Hoedjan* karya Pangeran Soeria Atmadja. Hasil penelitian ini adalah pembacaan interpretatif atas teks dihasilkan dari adanya suara-suara yang terpecah dan pengalaman-pengalaman yang dibungkam dalam karya.

Kata kunci: naratif; celah-ruang kosong; penghantuan; tak tertulis

FROM LITERAL TO INTERPRETATIVE: READING THE ‘UNWRITTEN TEXT’ IN LITERARY WORKS

ABSTRACT. The power of narrative literature is often discussed in relation to the narrative’s ability to open gaps and blank spaces that must be aesthetically engaged by its readers. However, an aesthetic reading does not fully accommodate the true potential of narrative literature. This potential is closely tied to the reality it represents in various ways—something that cannot be adequately addressed through purely aesthetic responses. This article aims to map out an optimal reading process of narrative literary works to support the development of literacy based on critical thinking, through the application of the concepts of *gap-blank* and *haunting-haunted*. These concepts are employed to reveal the phenomena of concealment, absence, or even erasure of narratives that contribute to a shift from literal reading to interpretive reading of *Ditoeng Memeh Hoedjan* by Pangeran Aria Soeriaatmadja. The findings of this study consist of an interpretative reading of the text that emerges from fragmented voices and silenced experiences within the work.

Keywords: narrative; gap-blank; haunting-haunted; unwritten

PENDAHULUAN

Meskipun karya sastra secara luas diakui sebagai medium yang kaya akan kompleksitas makna, praktik pembacaannya dalam banyak konteks akademik dan pedagogis masih cenderung berhenti pada tataran literal dan estetis. Teks sastra kerap diperlakukan sebagai objek apresiasi keindahan bahasa, alur, dan karakter, tanpa upaya sistematis untuk menelusuri mekanisme penyembunyian makna yang bekerja di balik struktur naratifnya. Akibatnya, potensi sastra sebagai ruang refleksi kritis atas realitas sosial, historis, dan pengalaman manusia yang kompleks belum sepenuhnya diaktualisasikan.

Paradigma pembacaan yang dominan tersebut menyisakan persoalan metodologis yang mendasar. Bahasa sastra tidak dirancang untuk menyampaikan makna secara langsung dan

transparan, melainkan justru mengandalkan ambiguitas, elipsis, metafora, serta ketidakhadiran sebagai strategi estetis (Ricoeur, 1976; Jakobson, 1987). Dalam banyak karya sastra naratif, peristiwa penting tidak selalu dihadirkan secara eksplisit; suara-suara tertentu justru dihilangkan atau terpecah, dan pengalaman-pengalaman krusial hanya muncul sebagai bayangan atau gangguan dalam alur cerita (Genette, 1980; Bal, 1997). Namun demikian, mekanisme ketidakhadiran ini sering kali tidak diperlakukan sebagai objek analisis utama, melainkan dianggap sebagai bagian sampingan dari gaya penceritaan (Abbott, 2008).

Di sinilah letak celah penelitian yang signifikan. Meskipun kajian sastra telah lama membahas peran pembaca dalam pembentukan makna (Iser, 1978; Fish, 1980), masih terbatas penelitian yang secara sistematis memetakan

proses pembacaan interpretatif terhadap ketakhadiran narasi sebagai sumber utama produksi makna (Prince, 1988; Herman, 2009). Pendekatan pembacaan yang ada cenderung menekankan analisis struktur atau tema yang tampak, sementara ruang kosong, penghilangan, dan keheningan naratif belum sepenuhnya dipahami sebagai strategi tekstual yang memiliki implikasi epistemologis dan ideologis (Macherey, 1978; Althusser, 2001).

Lebih jauh, keterputusan antara pembacaan estetik dan pembacaan kritis juga berdampak pada terbatasnya kontribusi sastra dalam pengembangan literasi berbasis *critical thinking* (Luke, 2012; Freire, 2005). Ketika pembacaan sastra tidak diarahkan untuk mengidentifikasi apa yang disembunyikan, dibungkam, atau tidak dikatakan oleh teks, pembaca kehilangan kesempatan untuk mengaitkan teks dengan pengalaman historis, traumatis, dan sosial yang sering kali hadir secara tidak langsung (Caruth, 1996; LaCapra, 2001). Padahal, justru pada wilayah inilah sastra berfungsi sebagai medium untuk merepresentasikan pengalaman yang sulit diartikulasikan secara literal (Felman & Laub, 1992; White, 1987).

Oleh karena itu, diperlukan kerangka pembacaan yang tidak hanya mengakui keberadaan makna implisit, tetapi juga mampu menjelaskan bagaimana makna tersebut dihasilkan melalui interaksi antara teks, ketakhadiran, dan pembaca. Penelitian ini menempatkan celah tersebut dengan menawarkan pemetaan proses pembacaan interpretatif yang berfokus pada konsep *gap*, *blank*, serta fenomena *haunting-haunted* dalam karya sastra naratif. Dengan menyoroti suara-suara yang terpecah dan pengalaman-pengalaman yang dibungkam, artikel ini berupaya menunjukkan bahwa pembacaan interpretatif bukan sekadar alternatif estetik, melainkan kebutuhan metodologis untuk mengungkap maksud teks yang sesungguhnya dan mengoptimalkan peran sastra dalam pengembangan literasi kritis, termasuk wacana kolonial dan praktik kekuasaannya yang diangkat dalam karya sastra.

Wacana kolonial tentang praktik-praktik kekuasaan dalam kajian poskolonial merupakan topik-topik mutakhir yang penting untuk diteliti melalui representasi-representasinya. Salah satu representasi dari praktik-praktik kekuasaan pada masa kolonial adalah *Ditioeng Memeh Hoedjan* (*DMH*) karya Pangeran Aria Soerjaatmadja, seorang bupati Sumedang periode 1883-1919. Karya tersebut cukup representatif menggambarkan “perlawanan” masyarakat terjajah pada masa kolonial. Sejumlah teks dalam karya

tersebut mempertentangkan keyakinan-keyakinan masyarakat pribumi dengan realitas yang dihadapi kaum pribumi dalam penguasaan kaum kolonialis. Pemanfaatan metafor-metafor tentang penguasa dalam *DMH* pun menjadi penting untuk diungkap menyangkut penyembunyian perlawanan dibalik kepatuhan formal seorang bupati atas penguasa tertingginya. *DMH* menunjukkan ambivalensi perlawanan-kepatuhan kaum pribumi. Di dalamnya pun tampak ambivalensi otoritatif-penyediaan kaum kolonialis dalam perbedaan kultural. Karya yang ditulis Pangeran Aria Soerjaatmadja tersebut menjadi bagian penting sebagai petunjuk ke arah pemberdayaan kekuatan metafora sebagai media perlawanan atas otoritas kolonial sekaligus sebagai penunjuk kesadaran identitas kaum pribumi yang dibentuk melalui praktik kekuasaan kolonial.

DMH mengandung ambivalensi atas praktik kekuasaan Kolonial. Bahasa metaforis yang digunakan di dalamnya pun menunjukkan ambivalensi tersebut. Postkolonial digunakan sebagai pendekatan atas teks dengan menitikberatkan pengungkapan ambivalensi-ambivalensi menyangkut praktik-praktik kekuasaan yang berhubungan dengan ambivalensi sikap kaum pribumi terhadap penguasa kolonial. Dalam perspektif kajian postkolonial, Bhabha menegaskan bahwa ambivalensi bukan saja sebagai penanda trauma subjek kolonial, tetapi juga sebagai ciri dari cara kerja otoritas kolonial serta perlawanannya. Kehadiran kolonial selalu ambivalen, terpecah antara menampilkan dirinya yang asli dan otoritatif dengan artikulasinya yang menunjukkan pengulangan dan perbedaan (Loomba (2003: 229). Kondisi tersebut dapat berimbas kepada kaum pribumi yang berada dalam dilema antara menerima sekaligus menolak pengaruh yang hadir dalam kehidupannya. Bahasa metaforis pun menjadi bagian yang merepresentasikan ambivalensi tersebut di tengah keharusan seorang bupati pada saat itu tunduk dan patuh kepada kepentingan kolonial.

Hardjasaputra (2004: 57) menunjukkan fungsi dan kedudukan bupati pada abad kesembilan belas. Menurutnya, sejak abad kesembilan belas, bupati memiliki dua fungsi dan peranan, yakni sebagai aparat kolonial (bupati sebagai objek kekuasaan pemerintah kolonial) dan sebagai pemimpin tradisional. Selaku pemimpin tradisional, bupati bertindak dalam ikatan tradisional-feodal; sebagai aparat kolonial, bupati bersikap sesuai aturan pemerintah. Bupati memegang peran penting sebagai perantara pemerintah kolonial dengan lembaga tradisional.

Kedudukan Pangeran Aria Soerjaatmadja menjadi cukup istimewa adalah ingatan kolektif

masyarakat Sumedang karena Pangeran Aria Soeriaatmadja merupakan *pangeran panung-tungan*. Dialah bupati Sumedang terakhir yang memperoleh gelar *pangeran*. Monumen lingga yang hingga saat ini berdiri di alun-alun Sumedang dan merupakan ikon kota Sumedang, pada awal pendiriannya justru ditujukan untuk mengenang jasa-jasa Pangeran Aria Soeriaatmadja selama memimpin Sumedang. Herlina (1998: 154) menyebutkan bahwa mulai awal abad kesembilanbelas, gelar pangeran bagi bupati-bupati Sumedang bukan lagi gelar kebangsawanan yang diperoleh secara turun temurun, melainkan sebagai penghargaan dari pemerintah Hindia Belanda sebagai imbalan atas jasa dan kesetiaan bupati tersebut kepada pemerintah setelah masa pengabdian yang panjang.

Sebagai seorang birokrat, Pangeran Aria Soeriaatmadja telah memperoleh gelar dan beberapa penghargaan dari pemerintah Hindia Belanda, yakni mendapat gelar Ranga, ketika menjabat Patih Afdeling pada 29 November 1875, gelar Tumenggung pada 30 Desember 1882, anugerah Bintang Emas pada 21 Agustus 1891, gelar Adipati pada 31 Agustus 1898, anugerah Bintang *Officier Van De Orde Van Orange Nassau* pada 27 Agustus 1903, gelar Aria pada 29 Agustus 1905, anugerah Songong Kuning pada 26 Agustus 1905, gelar Pangeran dengan Payung Emas pada 26 Agustus 1910, Anugerah Bintang Agung *Ridder Der Orde Van Den Nederlandschen Leeuw*, penghargaan tertinggi, diraih pada tanggal 17 September 1918 (Raksakusumah & Ekadjati, 1978: 157-160; Kartadibrata, 1988).

Oleh warga Sumedang, Pangeran Aria Soeriaatmadja, dipercayai sebagai orang keramat dan kharismatis. Akan tetapi, penilaian Residen Priangan Gessler Verschuier tentang kepemimpinan Pangeran Aria Soeriaatmadja justru berbeda. Pihak pemerintah kolonial menilainya sebagai pemimpin yang cenderung lemah dan kurang berambisi, sehingga pemerintah Hindia Belanda cukup menyukainya karena patuh terhadap ketentuan-ketentuan Pemerintah. Lagi pula dia cukup antipati terhadap Sarekat Islam, komunis, dan PNI. Pemerintah menyebutnya sebagai bupati yang “tidak berpolitik” Kondisinya cukup baik dalam pandangan pemerintah kolonial, karena Pangeran Aria Soeriaatmadja dianggap tidak progresif, tidak ambisius, dan sangat loyal kepada pemerintah (Herlina, 1998: 280).

Kehadiran *DMH* menjadi cukup menarik untuk dilihat dalam kaitannya dengan ambiva-

lensi. Karya tersebut tidak dapat dilepaskan dari sosok Pangeran Aria Soeriaatmadja yang tergambarkan secara kontradiktif dalam ingatan kolektif masyarakat Sumedang dan dalam catatan pemerintah Hindia Belanda. Latar belakang dan kondisi politik yang mewarnai Hindia Belanda pada dasawarsa kedua abad ke-20 yang berkaitan dengan isu *Indie weerbaar* dan *volksraad* pun sedikit banyak mempengaruhi *DMH*. Pada 1913, muncul gagasan mengenai pembentukan *Indie Weerbaar* (Pertahanan Hindia), yakni milisi paruh waktu yang terdiri dari penduduk bumiputera. Usulan ini mengemuka dengan pertimbangan bahwa memperluas milisi dianggap sebagai upaya pertahanan yang lebih murah dibandingkan memperbanyak tentara profesional. Pemerintah Hindia Belanda menolak gagasan tersebut. Ketika Perang Dunia I pecah pada 1914, usulan mengenai pembentukan *Indie Weerbaar* kembali mengemuka. Kali ini orang-orang Boedi Oetomo yang cukup gencar mengampanyekannya. Kampanye ini mendapat tanggapan dari Sarekat Islam yang menyuarakan tuntutan lebih, yakni perlunya perwakilan bumiputera dalam pemerintahan Hindia Belanda. Tuntutan *Indie Weerbaar* pun seketika berubah menjadi isu perwakilan rakyat. Percepatan kemandirian Hindia Belanda, meskipun tetap berada di bawah negeri induk Kerajaan Belanda, menuntut pentingnya kemampuan pertahanan, intelektual, dan ekonomi.

Meskipun, secara eksplisit tidak terdapat angka tahun pasti kapan karya ini diterbitkan, tetapi dapat diperkirakan bahwa *DHM* tersebut ditulis setelah tahun 1916. Angka tahun perkiraan tersebut disimpulkan berdasarkan informasi yang secara instrinsik terdapat dalam teks *DHM*, yakni “dina tanggal 31 Agustus 1916 aja gerakan Tulak bahla Hindia ...” dan “...Diwan Ra’jat (*Volksraad*), anoe ajeuna geus ngadeg”. *Volksraad* dibentuk pada 16 Desember 1916. Pada awalnya terdiri dari 38 anggota, yang mana 15 di antaranya adalah bumiputera.

Dengan demikian, pembacaan terhadap *DHM* dengan menggunakan pola interpretatif-kritis memungkinkan eksplorasi pembacaan sastra yang melampaui apresiasi estetik, dengan menempatkan celah (*gap*), ruang kosong (*blank*), serta fragmentasi suara sebagai elemen kunci produksi makna Melalui pola tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelusuri bagaimana teks *DHM* mengonstruksi ketidakhadiran sebagai strategi naratif yang mengaktifkan pembacaan kritis dan membuka hubungan antara teks dan realitas sosial, historis, serta ideologis yang direpresentasikan secara tidak langsung.

METIODE

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain interpretatif-kritis dalam kajian sastra. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa teks sastra naratif yang memuat kompleksitas makna, ketakhadiran, serta strategi penyembunyian narasi yang tidak dapat direduksi ke dalam data kuantitatif. Secara epistemologis, penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa makna sastra tidak bersifat tunggal atau sepenuhnya hadir secara eksplisit dalam teks, melainkan dihasilkan melalui proses pembacaan interpretatif yang melibatkan relasi dinamis antara teks, pembaca, dan konteks sosial-kultural.

Penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan generalisasi empiris, melainkan pemetaan konseptual dan metodologis mengenai proses pembacaan interpretatif karya sastra naratif. Oleh karena itu, validitas penelitian ditopang oleh koherensi teoretis, ketelitian analisis, dan konsistensi hubungan antara kerangka konseptual dan temuan tekstual (Miles et al., 2014).

Landasan Teoretis Metodologis

Kerangka metodologis penelitian ini dibangun melalui integrasi teori resepsi pembaca (*reader-response theory*), konsep *gap-blank*, serta konsep *haunting-haunted* (Iser, 1978; Gordon, 2008; Derrida, 1994). Integrasi ini memungkinkan pembacaan sastra yang memposisikan ketakhadiran dan penyembunyian bukan sebagai kekurangan teks, melainkan sebagai strategi produktif dalam pembentukan makna (Macherey, 1978).

Teori resepsi pembaca digunakan sebagai fondasi utama untuk memahami pembacaan sastra sebagai aktivitas interpretatif yang aktif (Iser, 1978). Dalam perspektif ini, teks dipahami sebagai struktur terbuka yang memerlukan partisipasi pembaca untuk mengaktualisasikan maknanya melalui pengisian celah, penafsiran ambiguitas, dan respons terhadap informasi yang dihilangkan atau disamarkan (Rosenblatt, 1995).

Konsep *gap* dan *blank* digunakan secara operasional untuk mengidentifikasi ketidakterpenuhan makna dalam teks, seperti elipsis naratif, fragmentasi peristiwa, atau absennya suara dan pengalaman tertentu (Iser, 1978). *Gap* dipahami sebagai ruang struktural yang memicu inferensi pembaca, sementara *blank* merujuk pada ketakhadiran yang lebih radikal, yakni penghilangan pengalaman atau perspektif yang secara implisit signifikan (Macherey, 1978).

Sementara itu, konsep *haunting-haunted* digunakan untuk membaca bagaimana ketakha-

diran tersebut justru menghasilkan kehadiran simbolik yang membayangi narasi melalui logika jejak (*trace*) dan penundaan makna (*différance*), dan pembelahan posisi subjek (Derrida, 1994; Gordon, 2008; Bhabha, 1994). *Haunting* dipahami sebagai mekanisme naratif melalui mana pengalaman traumatis, suara marginal, atau realitas yang direpresi muncul secara tidak langsung melalui jejak atau simbolisasi (Caruth, 1996). Integrasi ketiga konsep ini memungkinkan pergeseran sistematis dari pembacaan literal menuju pembacaan interpretatif yang kritis (Freire, 2005).

Objek dan Sumber Data

Objek penelitian ini adalah karya sastra naratif berjudul “Ditioeng Memeh Hoedjan” karya Pangeran Aria Soerjaatmadja yang dipilih secara purposif berdasarkan kompleksitas struktur naratif, adanya indikasi penyembunyian atau penghilangan narasi, serta keterbukaan teks terhadap pembacaan interpretatif yang melibatkan isu sosial, historis, atau ideologis. Unit analisis difokuskan pada segmen naratif yang menampilkan *gap*, *blank*, atau fenomena *haunting*, seperti dialog terputus, deskripsi ambigu, lompatan temporal, atau peristiwa penting yang dihilangkan atau hanya disinggung secara implisit.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui pembacaan mendalam (*close reading*) yang berulang dan reflektif. Pembacaan ini diarahkan pada aspek yang hadir secara tekstual dan pada ketidakhadiran, keheningan, dan gangguan naratif. Tahap awal dilakukan melalui pembacaan eksploratif untuk memperoleh gambaran umum struktur naratif dan mengidentifikasi area potensial ketegangan atau ambiguitas. Tahap berikutnya difokuskan pada identifikasi Sistematis *gap* dan *blank*, dengan pencatatan segmen-segmen yang menunjukkan elipsis, fragmentasi, atau penghilangan makna. Tahap selanjutnya diarahkan pada identifikasi fenomena *haunting*, yakni kemunculan simbolik pengalaman yang dibungkam melalui metafora, repetisi, atau disrupsi temporal. Seluruh proses dilakukan melalui pencatatan analitis dan pengodean tematik awal yang bersifat kualitatif, bertujuan mengorganisasi temuan untuk kepentingan analisis interpretatif.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tahapan interpretasi bertingkat yang bersifat reflektif dan dialektis. Tahap pertama berupa pembacaan

literal untuk mengidentifikasi fungsi naratif segmen-segmen data dalam struktur cerita. Tahap kedua merupakan analisis interpretatif berbasis konsep gap dan blank, yang menelaah bagaimana ketidakhadiran dan penyembunyian berfungsi sebagai strategi estetik dan ideologis.

Tahap ketiga menggunakan konsep *haunting–haunted* untuk menelusuri kehadiran simbolik suara dan pengalaman yang dibungkam, serta keterkaitannya dengan realitas sosial dan historis yang direpresentasikan secara tidak langsung. Tahap akhir berupa sintesis interpretatif yang mengaitkan seluruh temuan dengan tujuan penelitian, khususnya terkait teks terselubung dalam *DMH* di bawah bayang-bayang kolonialisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metafor Relasi *Colonized* dan *Colonizer*

Dalam *DMH*, hubungan antara bangsa terjajah (bumiputera) dengan penjajah (pemerintah kolonial Belanda) dimetaforakan seperti layaknya *manoeek leuweung* dan *manoeek semah*. Dalam beberapa kesempatan, bumiputera direpresentasikan juga sebagai *manoeek-manoek pribumi*: *Manoeek semah saderoning loemampah njiar boeboeahan anoe araneh teh asoepna ka djero eta leuweung beuki lila beuki nengah bae, sarta bari ngaweswes ngahakan boeboeahan sakoer anoe kapanggih* (*DMH*, tt: 22). Penetrasi kolonial yang semakin dalam pada banyak bidang kehidupan, disadari telah banyak merenggut sumber daya maupun tatanan tradisi yang sebelumnya telah hidup di tengah-tengah masyarakat. *Colonizer* dalam bahasa Pangeran Aria Soeriaatmadja ditunjukkan melalui pilihan kata *beuki nengah* (penetrasi), *ngaweswes ngahakan* (eksploitasi). Akan tetapi, bumiputera (*manoeek leuweung*) sejatinya tidak mempersoalkan hal tersebut karena pihak kolonial (*manoeek semah*) dianggap telah berkontribusi kepada kehidupan di *leuweung* (Hindia Belanda, khususnya Sumedang), membuat bumiputera beuki *tambah pinter* (pendidikan dan kemampuan intelektual) *djeung beuki tambah koeat* (fisik dan kesehatan).

Atas segala kontribusinya, *colonizer* tidak lagi sepantasnya dianggap sebagai pihak luar, mereka adalah bagian integral dari kehidupan para *colonized*. Bahkan, *manoeek semah* inilah yang kemudian menjadi pemimpin. Dengan posisinya yang demikian pemerintah kolonial menjadi berkewajiban untuk ‘mengurusi’ kehidupan kaum bumiputera: “*Tina sabab manehanana ajeuna geus djadi Radja ngarasa*

boga oeroeseun nja eta rahajat, da manehanana teh soerti” (*DMH*, tt: 23).

Kemajuan negeri jajahan (Hindia Belanda, khususnya Sumedang) menarik perhatian bangsa lain (*matak pikabitaen deungeun-deungeun*). Keadaan demikian diperkirakan akan mengganggu ikatan *manoeek leuweung* (bumiputera) dan *manoeek semah* (pemerintah kolonial Belanda) dan tatanan yang telah terbentuk. Bagi Pangeran Aria Soeriaatmadja, untuk mengatasi ancaman itu, perlu kesadaran bahwa bumiputera dan pemerintah kolonial memiliki kewajiban yang sama untuk mempertahankan *status quo*. “*Oerang Pribumi anoe geus kapandjangan koe pangadjaran mah, ngarasa sabagdja-satjilaka djeung Nederland salalawasna*” (*DMH*, tt: 35).

DMH menunjukkan pergeseran-pergeseran relasi antara *colonizer* dan *colonized*. Jika semula *colonizer* bukan merupakan bagian integral dari tatanan yang sudah dibangun penduduk bumiputera, pada perjalanan selanjutnya, karena ‘kontribusi’ yang telah mereka lakukan *colonizer* dan *colonized* sama-sama membentuk suatu tatanan yang mana keduanya merupakan bagian tak terpisahkan dari tatanan yang kemudian terbentuk itu. Penetrasi dan eksploitasi *colonizer* menjadikan mereka *Radja* dalam tatanan masyarakat kolonial, suatu ancaman, yang secara ambivalen justru dimaknai oleh Pangeran Aria Soeriaatmadja sebagai keuntungan bagi bumiputera karena dengan demikian *colonizer* menjadi berkewajiban untuk memajukan *colonized*.

Kemandirian atau Ketergantungan

Perang besar di Eropa (sering disebut sebagai perang dunia I) yang berlangsung sejak 1914, dirasakan Pangeran Aria Soeriaatmadja akan mengganggu kelangsungan hidup Hindia Belanda. “*Ganti Radja*” dari Pemerintah Hindia Belanda menjadi pemerintahan Eropa lainnya, menjadi sesuatu yang sangat merisaukannya. Dampak dari perang besar di Eropa tersebut dikhawatirkan akan menjalar sampai Hindia Belanda. Baginya, upaya mencegah ancaman semacam itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah kolonial dan rakyat bumiputera. “*Walanda jeung Pribumi ... baris paheujeuk-heujeuk leungeun hajang babarengan ngabelaan kaperloeian pikeun sarerea*” (*DMH*, tt: 35). Keterlibatan secara aktif penduduk bumiputera dapat diwujudkan melalui pembentukan milisi bumiputera, yang menurutnya sejalan dengan gerakan *Toelak bahla Hindia* (*Indie Weerbaar*) yang diserukan perkumpulan bumiputera pada 31 Agustus 1916.

... doemeh diajaan kamistian lakon-djoerit (*militieplicht*); koe eta kamistian rahajat-rahajat lalaki, boh kabeh boh sawareh, samangsa-mangsa oemoerna geus nepi kana wates anoe ditangtoekeun, biasana 19 taheen, dipaksa koedoe ngasaan diadjar djadi soldadoe. Ari lilana aja noe heubeul aja noe sakeudeung... samemeh oemoer 45 taheen, manehna tatjan lesot tina eta kamistian, tegesna, samemeh oemoer sakitoe mah salawasna oge beunang ditarik, sina ngabelaan bali geusan ngadjadina. (DMH, tt: 33)

Militieplicht yang akan dilakukan oleh penduduk bumiputera, tentunya harus mendapat penghargaan dari pemerintah kolonial. Pangeran Aria Soeriaatmadja mengajukan diberikannya hak-hak baru bagi bumiputera yang telah melaksanakan kewajiban pertahanan negara, yakni kepangkatan (*gawe negara*/ aparat pemerintah), tanah, dan yang terpenting adalah pemberian hak “*ngaloe earkeun sawara pikeun kana Diwan Ra'jat*” (DMH, tt: 36).

Tuntutan diberikannya hak-hak baru bagi kalangan bumiputera, tidak berarti mengganti sama sekali tatanan sosial, politik, dan ekonomi yang telah dibangun oleh pemerintah kolonial. Justru hak-hak tersebut dapat terpenuhi manakala segala tatanan kolonial di Hindia tetap terpelihara. DMH, berupaya menyampaikan suatu gagasan bahwa demi melanjutkan kemajuan yang sudah diperoleh dan hak-hak baru bagi bumiputera, maka kepentingan-kepentingan kolonial perlu dipertahankan. Dengan kata lain, tercapainya ‘kemajuan’ bagi bumiputera harus berjalan seiring dengan terpeliharanya kepentingan-kepentingan pemerintah kolonial.

Oerang Walanda, karépna di Hindia teh arek njeun wawangoenan anoe aloes toer koeat. Pademen-pademenna anggeus dipasang, kari tembokna. Keun sina apik masang-masangkeunana bata, soepaja eta wawangoenan oelah tereh roentoeh, jeung oerang pada miloe ngadoedoe'a moega-moega oelah hoedjan, soepaja oelah aja waktue anoe kapieutjeun, oelah moebah gawena. (DMH, tt: 41)

Dalam DMH, ketika kepentingan pemerintah kolonial di Hindia Belanda tidak dapat dipertahankan, salah satunya akibat merambatnya dampak Perang Dunia I ke Hindia

Belanda yang dapat mengakhiri kelangsungan kekuasaan Belanda atas Hindia Belanda, maka bumiputera akan kembali pada kondisi semula yang ‘memprihatinkan’: “*Sadaja manoe-manoe eusi ieu leuweung kantenan wangsoel kana asalna kapoengkoer, kawit teu oeroes djadi teu oeroes deui. Eh nalangsa temen!*” (DMH, tt: 40). Dalam DMH, kemandirian dan kemajuan bumiputera hanya bisa diusahakan dengan bergantung pada terpeliharanya tatanan yang telah terbangun di Hindia Belanda.

Sakoemaha piheubeuleunana deui, oerang Priboemi kana pibogaen daradjat sakieu, lamoen maranehana-na ajeuna oedjoeg-oedjoeg ganti wae goeroe djeung doenoengan! Koemaha kira-kira bangsa Priboemi Hindia, anoe sakitoe atahna keneh kana ngadeg njorangan, na kira-kirana baris leuwih senang, lamoen ieu kaperloean Hindia kadjabel koe hidji bangsa, anoe woengkoel ngarah geusan pangdoemoekan batoerbatoerna, doemeh di lemboerna pribadi geus sakitu sesekna! Ieu kaperloean Hindia, moen kareboet koe eta bangsa the, saroea bae djeung sato beunang moro, toeloj diretjah koe paninggaran sabatoerbatoerna (DMH, tt: 40)

Kolonialisme di Hindia Belanda menempatkan elit tradisional, terutama bupati dan aparat birokrasi pribumi, dalam posisi yang secara historis ambivalen. Belanda mengandalkan bupati sebagai perpanjangan tangan kekuasaan kolonial untuk memungut pajak, mengatur urusan lokal, dan menjaga ketertiban masyarakat. Posisi tersebut memberikan legitimasi, status sosial, dan perlindungan hukum bagi elit lokal, namun sekaligus membatasi otonomi politik dan kultural mereka. Elit tradisional harus menavigasi dilema antara mempertahankan kemandirian dan tetap bergantung pada kolonial untuk menghindari risiko dominasi yang lebih represif dari kekuatan Eropa lain yang bersaing di wilayah Nusantara.

Ambivalensi ini juga bersifat ideologis dan struktural. Kemandirian yang dicita-citakan para elit tradisional tidak pernah absolut; kebergantungan pada Belanda bersifat pragmatis, tetapi membatasi kebebasan politik dan kemampuan bersuara. Kritik terbuka terhadap kolonial berisiko merusak legitimasi dan bahkan keselamatan posisi mereka. Dalam konteks ini, ekspresi politik formal menjadi sangat terbatas,

sehingga elit tradisional perlu mencari strategi lain untuk menyalurkan aspirasi kritis tanpa menghadapi risiko nyata.

Sastra muncul sebagai salah satu strategi adaptif tersebut. *DMH* ditulis oleh Pangeran Soeria Atmadja sebagai elit tradisional yang dekat dengan birokrasi kolonial. *DMH* ditulis menggunakan narasi metaforis, simbolik, atau fragmentaris untuk menyampaikan kritik secara terselubung. Suara yang terpecah, pengalaman yang dibungkam, dan narasi yang terfragmentasi memungkinkan ekspresi aspirasi kemandirian dan kritik terhadap kolonialisme disampaikan dengan aman di mana ketegangan antara kemandirian dan kebergantungan dapat dieksplorasi tanpa konfrontasi langsung dengan kekuasaan kolonial.

Tema dan karakter dalam *DMH* mencerminkan dilema historis elit tradisional. Tokoh yang berusaha mempertahankan otonomi selalu dihadapkan pada kekuatan eksternal yang lebih besar. Aspirasi lokal terbentur oleh keterbatasan struktural kolonial. Dalam kerangka ini, *DMH* menjadi medium ekspresi estetis sekaligus sebagai strategi untuk menegosiasikan posisi sosial, moral, dan politik kaum pribumi. Dengan memanfaatkan celah naratif (*gap*), ketakhadiran pengalaman (*blank*), dan jejak suara (*haunting*), pesan kritis dapat tersampaikan tanpa risiko langsung terhadap jabatan atau keselamatan elit.

Ambivalensi ini selaras dengan teori poskolonial dan kritik sastra kontemporer. Homi K. Bhabha menekankan bahwa identitas kolonial bersifat terbelah dan berosilasi antara dominasi dan resistensi, menghasilkan posisi hibrida yang kompleks (Bhabha, 1994). Kondisi ini tercermin dalam *DMH* di mana kritik terhadap kolonialisme hadir secara tidak langsung melalui narasi yang terfragmentasi. Konsep ketakhadiran dan *haunting*, sebagaimana dikemukakan Derrida dan Gordon, memungkinkan pengalaman yang dibungkam tetap hadir secara simbolik, memperlihatkan ambivalensi posisi elit: keinginan untuk mandiri berjalan beriringan dengan ketergantungan struktural.

Dari perspektif historis, kemampuan adaptif elit tradisional yang terkandung dalam *DMH* memungkinkan kaum pribumi melalui elit tradisionalnya mempertahankan aspirasi kemandirian, menegosiasikan identitas, dan menyampaikan kritik sosial tanpa menimbulkan risiko politis langsung. Dengan demikian, karya sastra menjadi sarana untuk mempertahankan posisi sekaligus mengekspresikan ketegangan antara otonomi dan kebergantungan yang menegaskan bahwa dominasi kolonial tidak hanya berupa

kontrol material, tetapi juga pengaturan wacana dan narasi.

Dilema kemandirian versus kebergantungan elit tradisional di Hindia Belanda adalah cerminan kondisi kolonial yang kompleks. Ketidakmampuan kaum pribumi untuk bersuara secara terbuka bukanlah ketidakberdayaan mutlak; sastra menyediakan medium aman untuk mengartikulasi kritik dan aspirasi kemandirian. Ambivalensi dalam *DMH* menunjukkan bagaimana elit menegosiasikan identitas, kuasa, dan otonomi mereka di tengah tekanan kolonial, sehingga *DMH* menjadi sarana politis sekaligus historis.

SIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa kekuatan utama karya sastra naratif tidak terletak semata-mata pada apa yang hadir secara eksplisit dalam teks, melainkan pada lapisan makna implisit yang bekerja melalui ketakhadiran, penyembunyian, dan fragmentasi narasi. Pembacaan sastra yang berhenti pada tataran literal dan estetis terbukti tidak memadai untuk mengungkap maksud teks secara utuh, karena bahasa sastra secara inheren dibangun melalui ambiguitas, elipsis, dan strategi representasinya. Oleh karena itu, pembacaan interpretatif terhadap *DMH* dapat memosisikan pembaca sebagai subjek aktif dalam produksi makna.

Melalui penerapan konsep *gap-blank* dan *haunting-haunted*, penelitian ini menunjukkan bahwa ruang kosong, keheningan, serta suara-suara yang dibungkam dalam teks bukanlah kekurangan struktural, melainkan mekanisme naratif yang secara sengaja mengarahkan pembaca pada kerja interpretatif. Ketakhadiran dalam teks justru berfungsi sebagai penanda penting yang menghubungkan narasi dengan pengalaman historis (kolonialisme), sosial, dan traumatis yang tidak selalu dapat direpresentasikan secara langsung. Dengan demikian, makna sastra tidak ditemukan semata-mata dalam apa yang dikatakan, tetapi dalam apa yang disembunyikan dan bagaimana penyembunyian tersebut bekerja.

Dalam konteks ini, pembacaan interpretatif berbasis *critical thinking* menjadi krusial. Proses pembacaan tidak hanya melibatkan pemahaman isi cerita, tetapi juga analisis kritis terhadap strategi naratif, relasi kuasa, serta ideologi yang melandasi produksi dan penyamaran makna. *Critical thinking* memungkinkan pembaca mempertanyakan absensi narasi, mengidentifikasi suara yang dimarginalkan, dan

menelusuri hubungan antara teks dan realitas yang direpresentasikan secara simbolik. Dengan kata lain, pembacaan interpretatif merupakan praktik reflektif yang menggabungkan sensitivitas estetik dengan kesadaran kritis.

DMH merepresentasikan ambivalensi golongan penguasa pribumi dalam perubahan-perubahan persepsi atas otoritas kolonial. Ambivalensi yang paling tipikal dalam *DMH* ditunjukkan melalui cara narasi disusun berdasarkan pemberdayaan metafor-metafor untuk mewakili golongan-golongan penguasa baik penguasa pribumi, penguasa kolonial, maupun penguasa dari Eropa lainnya (Non Belanda). Pemanfaatan metafor-metafor tersebut dimaksudkan untuk menyembunyikan perlawanan-perlawanan langsung menyangkut otoritas penguasa kolonial. Namun demikian, di samping penyembunyian yang diwakilkan kepada metafor-mertafor tersebut, pengarang *DMH* pada akhirnya menunjukkan sikap mengenai upaya pembebasan bangsa dalam cengkraman penguasa kolonial yang kemudian beralih ke sikap-sikap penerimaan atas otoritas kolonial manakala diketahui bahwa ancaman sesungguhnya yang lebih besar dianggap akan datang dari pihak penguasa Eropa Non-Belanda. Ambivalensi yang ditunjukkan *DMH* terletak di antara persinggungan peredaman dan kehati-hatian menunjukkan reaksi prontal terhadap penguasa kolonial dengan kebutuhan meluapkan kritik atas kekuasaan kolonial yang di dalamnya upaya kaum pribumi untuk membebaskan diri dari cengkraman kekuasaan kolonial terus dijalankan. Kondisi demikian semakin menghasilkan kerentanan antara memaklumi kekuasaan kolonial Belanda karena akan adanya resiko yang lebih besar yang datang dari penguasa Eropa (Non-Belanda) dengan upaya menyusun kekuatan melalui negosiasi terhadap pihak penguasa kolonial untuk sepakat disusunnya sebuah kekuatan yang bersumber dari kekuatan kaum pribumi.

Ancangan metodologis yang ditawarkan dalam artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian sastra dengan menyediakan kerangka pembacaan yang sistematis untuk membongkar “teks tak tertulis” dalam karya sastra naratif. Selain memperkaya diskursus teoretis, pendekatan ini juga memiliki implikasi pedagogis yang signifikan, khususnya dalam pengembangan literasi berbasis *critical thinking*. Dengan mendorong pembaca untuk aktif menafsirkan ketakhadiran dan keheningan dalam teks, sastra dapat difungsikan secara optimal sebagai medium pembelajaran reflektif yang tidak hanya mengasah kepekaan estetik, tetapi

juga kemampuan berpikir kritis terhadap kompleksitas pengalaman manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, H. P. (2008). *The Cambridge introduction to narrative* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Althusser, L. (2001). *Ideology and ideological state apparatuses* (B. Brewster, Trans.). Verso. (Karya asli diterbitkan 1970)
- Bal, M. (1997). *Narratology: Introduction to the theory of narrative* (2nd ed.). University of Toronto Press.
- Bhabha, H. K. (1994). *The location of culture*. Routledge.
- Caruth, C. (1996). *Unclaimed experience: Trauma, narrative, and history*. Johns Hopkins University Press.
- Derrida, J. (1994). *Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning and the New International*. New York: Routledge.
- Felman, S., & Laub, D. (1992). *Testimony: Crises of witnessing in literature, psychoanalysis, and history*. Routledge.
- Fish, S. (1980). *Is there a text in this class? The authority of interpretive communities*. Harvard University Press.
- Freire, P. (2005). *Pedagogy of the oppressed* (30th anniversary ed.). Continuum. (Karya asli diterbitkan 1970)
- Genette, G. (1980). *Narrative Discourse: An Essay in Method*. Ithaca: Cornell University Press.
- Gordon, A. F. (2008). *Ghostly Matters: Haunting and the Sociological Imagination*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Hardjasaputra, A. Sobana. 2004. “Bupati di Priangan: Kedudukan dan Peranannya pada Abad ke-17 – Abad ke-19”. *Sundalana* 3. Bandung: Pusat Studi Sunda.
- Herman, D. (2009). *Basic elements of narrative*. Wiley-Blackwell.

- Herlina, Nina. 1998. *Kehidupan Kaum Ménak Priangan 1800-1942*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
- Iser, Wolfgang. 1987. *The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
- Jakobson, R. (1987). *Language in literature* (K. Pomorska & S. Rudy, Eds.). Harvard University Press.
- Kartadibrata, R. M. Abdullah. 1988. *Riwayat Kangjeng Pangeran Aria Suria Atmaja (Pangeran Mekah); Bupati Sumedang Taun 1882-1919*. Sumedang: museum Prabu Geusan Ulun
- LaCapra, D. (2001). *Writing history, writing trauma*. Johns Hopkins University Press.
- Loomba, Ania. 2003. *Kolonialisme/ pascakolonialisme*. diterjemahkan Hartono Hadikusumo dari buku *Colonialism /Postcolonialism*. Jogjakarta: Bentang Budaya.
- Luke, A. (2012). Critical literacy: Foundational notes. *Theory Into Practice*, 51(1), 4–11. <https://doi.org/10.1080/00405841.2012.636324>
- Macherey, P. (1978). *A theory of literary production* (G. Wall, Trans.). Routledge & Kegan Paul.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Prince, G. (1988). *A dictionary of narratology*. University of Nebraska Press.
- Raksakusumah, Said & E.S. Ekadjati. 1978. *Babad Sumedang (Transkripsi)*. Bandung: Lembaga Kebudayaan Unpad.
- Ricoeur, P. (1976). *Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning*. Fort Worth: Texas Christian University Press.
- Rosenblatt, L. M. (1995). *Literature as exploration* (5th ed.). Modern Language Association.
- Soerjaatmadja, Aria. (tanpa tahun). *Ditioeng Memeh Hoedjan*. Tanpa Penerbit
- White, H. (1987). *The content of the form: Narrative discourse and historical representation*. Johns Hopkins University Press.